

Laporan monitoring Rencana Aksi Tahun Anggaran 2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar											13					
I	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan																
		DLHK															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100		100		100		Sangat Tinggi	Beberapa UPTD dan Cabang Dinas (UPTD SPTH, CDLHK Labak Tangerang, CDLHK Pandeglang Serang dan Cilegon belum memiliki gedung kantor sendiri	Mengusulkan Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor		= Σ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	500.000.000	100%	481.147.300	100,00	96,23		Adanya Penyusunan Anggaran (Pegeseran Anggaran) Sehingga perlu penyusunan Anggaran dari yang sudah direncanakan	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Kegiatan Secara Efektif dan Efisien			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	100.000.000	9 dokumen	93.745.950	100,00	93,75						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.700.000	1 dokumen	11.519.000	100,00	73,37						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	15.700.000	1 dokumen	15.176.000	100,00	96,66						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13.200.000	1 dokumen	12.691.000	100,00	96,14						
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	13.200.000	1 dokumen	12.023.000	100,00	91,08						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	218.000.000	6 laporan	214.936.450	100,00	98,59						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	124.200.000	5 laporan	121.055.900	100,00	97,47						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	33.242.868.400	100%	33.134.614.144	100,00	99,67		Proses Pengadministrasian Dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan Beberapa Kegiatan Masih Belum Tepat Waktu Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	Proses Persiapan Pengadministrasian Dan Pelaporan Yang Lebih Baik Lagi Serta Peningkatan Koordinasi Dengan Pelaksana Kegiatan Dengan Memperhatikan Dan Mengacu Pada Rencana Operasional Kegiatan Atau (rok) Yang Telah Dibuat			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	32.486.595.000	139 Orang	32.385.449.409	100,00	99,69						
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	610.000.000	12 Dokumen	606.099.000	100,00	99,36						
				Pelaksanaan Penata Usaha dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3	84.070.000	3 Dokumen	81.246.640	100,00	96,64						
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	10.000.000	1 dokumen	9.882.950	100,00	98,83						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	1 Laporan	9.930.845	100,00	99,31						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	10.000.000	1 Laporan	9.930.555	100,00	99,31						
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	22.203.400	2 dokumen	22.144.135	100,00	99,73						
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000	1 Dokumen	9.930.610	100,00	99,31						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	27.300.000	100%	26.251.500	100,00	96,16		Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan, kebutuhan Gedung Kantor Untuk Uptd/cdlhk, Kendaraan Dinas Lapangan /operasional))	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran Serta Mengusulkan/mencanakan Penyediaan Sapras Dan Penyajian Anggaran Pada Tahun Berikutnya			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	27.300.000	1 Laporan	26.251.500	100,00	96,16						

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>	100%	78.000.000	100%	73.480.000	100,00	94,21		terbatasnya ketersediaan anggaran dalam peningkatan kapasitas aparatur	Dukungan Anggaran Dan Perencanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Yang Lebih Baik			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang (24 Kegiatan)	78.000.000	8 Orang (24 Kegiatan)	73.480.000	100,00	94,21						
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah</b>	100%	688.853.700	100%	686.395.157	100,00	99,64		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	56.940.000	2 Paket	56.864.000	100,00	99,83						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	183.767.000	2 Paket	183.092.610	100,00	99,63						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	143.900.000	2 Paket	143.432.570	100,00	99,68						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75.955.000	2 Paket	75.286.857	100,00	99,12						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	22.491.700	2 Dokumen	22.448.000	100,00	99,81						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	164.850.000	12 Laporan	164.747.620	100,00	99,94						
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	40.950.000	2 Dokumen	40.541.500	100,00	99,00						
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	276.030.700	100%	267.826.680	100,00	97,03		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	225.408.300	40 Unit	221.315.911	100,00	98,18						
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.622.400	2 Unit	46.510.769	100,00	91,88						
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	7.962.304.645	100%	7.854.795.648	100,00	98,65		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	519.933.793	1 Laporan	505.828.378	100,00	97,29						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	7.442.370.852	6 Laporan	7.348.967.270	100,00	98,74						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	948.720.855	100%	931.579.225	100,00	98,19		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	483.410.000	30 Unit	473.445.510	100,00	97,94						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	300.000.000	22 Unit	296.376.605	100,00	98,79						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	102 Unit	130.400.555	102 Unit	127.378.780	100,00	97,68						
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.902.000	1 Unit	4.507.150	100,00	91,95						
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	30.008.300	1 Unit	29.871.180	100,00	99,54						
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan</b>	100%	484.365.000	100%	481.550.230	100,00	99,42		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.494.100	100,00	99,92						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	1 Paket	34.881.300	100,00	99,66						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	395.000.000	6 Paket	393.314.220	100,00	99,57						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.085.270	100,00	93,62						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	40.365.000	12 Laporan	39.775.340	100,00	98,54						
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan</b>	100%	785.000.000	100%	782.522.405	100,00	99,68		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Unit	785.000.000	13 Unit	782.522.405	100,00	99,68						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan</b>	100%	534.950.000	100%	533.473.530	100,00	99,72		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	184.950.000	10 Unit	184.498.800	100,00	99,76						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	350.000.000	136 Unit	348.974.730	100,00	99,71						
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang</b>	100%	124.309.000	100%	96.610.619	100,00	77,72		Terbatasnya SDM di CDLHK LT	Mengusulkan Penambahan SDM			
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.877.300	1 Paket	2.690.000	100,00	93,49						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.386.500	1 Paket	12.729.700	100,00	88,48						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.365.700	1 Paket	1.185.000	100,00	86,77						
				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	19.633.000	1 Paket	18.342.300	100,00	93,43						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.591.000	1 Paket	9.464.000	100,00	98,68						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	4.795.500	1 dokumen	4.794.000	100,00	99,97						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	71.660.000	12 Laporan	47.405.619	100,00	66,15						
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang</b>	100%	67.978.000	100%	67.700.000	100,00	99,59		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	8.165.400	1 Paket	8.050.000	100,00	98,59						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	59.812.600	4 Unit	59.650.000	100,00	99,73						
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang</b>	100%	378.800.000	100%	343.030.280	100,00	90,56		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	58.800.000	12 Laporan	48.030.280	100,00	81,68						
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	295.000.000	100,00	92,19						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Lebak Tangerang</b>	100%	121.420.000	100%	113.437.800	100,00	93,43		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	88.300.000	8 Unit	80.642.300	100,00	91,33						
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	33.120.000	24 Unit	32.795.500	100,00	99,02						
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon</b>	100%	188.723.000	100%	187.802.300	100,00	99,51		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	57.523.000	1 Paket	57.416.000	100,00	99,81						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	22.500.000	1 paket	22.325.600	100,00	99,22						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	9.000.000	1 Paket	8.748.000	100,00	97,20						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	13.500.000	1 Dokumen	13.492.700	100,00	99,95						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.200.000	12 Laporan	85.820.000	100,00	99,56						
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK Pandeglang Serang</b>	100%	279.100.000	100%	243.540.000	100,00	87,26		tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar			

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	279.100.000	2 Unit	243.540.000	100,00	87,26						
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada CDLHK PSC</b>	100%	187.650.000	100%	183.306.852	100,00	97,69	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.650.000	12 Laporan	27.815.652	100,00	93,81						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	158.000.000	2 laporan	155.491.200	100,00	98,41						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC</b>	100%	225.094.600	100%	223.313.300	100,00	99,21	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	75.094.600	12 Unit	74.123.900	100,00	98,71						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	150.000.000	26 Unit	149.194.400	100,00	99,46						
				<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	100%	159.296.500	100%	158.584.370	100,00	99,55	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	4.901.215	100,00	98,02						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	35.400.000	5 Paket	35.174.275	100,00	99,36						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	37.840.000	12 Paket	37.698.880	100,00	99,76						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	12.000.000	1 Paket	11.996.150	100,00	99,97						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	2.880.300	100,00	96,01						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	46.056.500	12 Laporan	45.933.450	100,00	99,73						
				<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	100%	460.000.000	100%	455.888.778	100,00	99,11	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	162.663.900	20 Unit	161.111.250	100,00	99,05						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	297.336.100	7 Unit	294.777.528	100,00	99,14	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	100%	40.703.500	100%	40.347.430	100,00	99,13	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.703.500	12 Bulan	40.347.430	100,00	99,13						
				<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten</b>	100%	1.386.059.703	100%	1.357.622.905	100,00	97,95	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	100.000.000	10 Unit	99.854.430	100,00	99,85						
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	1.286.059.703	6 Unit	1.257.773.475	100,00	97,80						
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)</b>	<b>Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH</b>	100%	148.858.400	100%	120.610.850	100,00	81,02	belum optimalnya Perencanaan Anggaran pada UPTD SPTH	Penyusunan perencanaan agrgan yang lebih baik				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	15.000.000	26 Paket	13.064.600	100,00	87,10						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	4 Paket	18.260.900	100,00	73,04						
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	37.692.000	12 Paket	25.794.950	100,00	68,44						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	7.214.400	4 Paket	4.305.600	100,00	59,68						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.400.000	12 Dokumen	5.331.800	100,00	98,74						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.552.000	12 Laporan	53.853.000	100,00	91,97						
				<b>Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)</b>	100%	155.054.600	100%	142.178.200	100,00	91,70	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	1 Unit	35.950.200	100,00	89,88						
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	13.000.000	1 Paket	12.879.000	100,00	99,07						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	18 Unit	102.054.600	18 Unit	93.349.000	100,00	91,47						
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)</b>	<b>Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD SPTH)</b>	100%	155.500.000	100%	122.287.244	100,00	78,64	belum optimalnya Perencanaan Anggaran pada UPTD SPTH	Penyusunan perencanaan agrgan yang lebih baik				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	77.000.000	12 laporan	44.901.844	100,00	58,31						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	78.500.000	12 Laporan	77.385.400	100,00	98,58						
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)</b>	<b>Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH</b>	100%	411.156.000	100%	399.926.250	100,00	97,27	tidak ada masalah	Kegiatan Pelaksanaan Berjalan Lancar				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	125.290.000	10 Unit	124.087.600	100,00	99,04						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	57.076.000	23 Unit	56.366.700	100,00	98,76						
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	228.790.000	5 Unit	219.471.950	100,00	95,93						

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						13
1	2	3	4	5	6								14	15	16	17	
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
					Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100		100		100		Sangat Tinggi	- Perda terkait RPPLH masih dalam proses/belum ditetapkan - tidak semua kabupaten/kota sudah selesai menyusun dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota	- Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = $\Sigma$ dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) + $\Sigma$ dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di bagi Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi dikali 100%	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	3 Dokumen	343.000.000	3 Dokumen	329.840.750	100,00	96,16		- Perda terkait RPPLH masih dalam proses/belum ditetapkan - tidak semua kabupaten/kota sudah selesai menyusun dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota	- Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 dokumen	151.540.000	1 dokumen	146.362.250	100,00	96,58						
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 dokumen	191.460.000	2 dokumen	183.478.500	100,00	95,83						
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	6 dokumen	681.398.050	6 dokumen	647.587.286	100,00	95,04		- Masih berubah-ubah aturan terkait penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD yang menyebabkan perubahan dokumen ditengah-tengah pengerjaan - Masih banyak tim penyusun KLHS Kab/Kota yang belum memahami proses penyusunan KLHS secara benar - Proses penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia membuat proses validasi terhambat.	- Melakukan asisten terhadap tim penyusun KLHS Kab/Kota. - Berkoordinasi secara intens dengan KLHK RI - Mensupport seluruh data yang dibutuhkan oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD			
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	3 Dokumen	109.020.000	3 Dokumen	96.238.175	100,00	88,28						
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	2 Dokumen	557.532.000	2 Dokumen	539.436.361	100,00	96,75						
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	14.846.050	1 Dokumen	11.912.750	100,00	80,24						
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
					Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	51		53,49		104,88		Sangat Tinggi	- Adanya Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, perubahan iklim, kemarau panjang - masih rendahnya koordinasi multi-stakeholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran (Air, Udara dan Air laut)	- Meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran khususnya pencemaran udara - Menambah jumlah peserta sosialisasi terkait pengendalian pencemaran - Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder khususnya dalam program pengendalian pencemaran - Melakukan inovasi yang terkait program pengendalian pencemaran udara Air dan Air Laut		Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan hidup = $\Sigma$ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + $\Sigma$ Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + $\Sigma$ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 5 tahun	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15 dokumen	3.172.642.000	15 dokumen	3.127.752.040	100,00	98,59		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	530.601.200	4 Dokumen	517.587.740	100,00	97,55						
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	11 dokumen	2.642.040.800	11 dokumen	2.610.164.300	100,00	98,79						
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Titik Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Titik	131.240.000	3 Titik	130.707.400	100,00	99,59		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah			
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik	131.240.000	3 Titik	130.707.400	100,00	99,59						
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	59.725.000	1 dokumen	59.308.380	100,00	99,30		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 dokumen	59.725.000	1 dokumen	59.308.380	100,00	99,30						
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	21		21		100,00		Sangat Tinggi	Adanya Peralatan (opsi) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Peralatan pada Tahun berikutnya		Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan IK=(% IK Peningkatan Kompetensi+% IK Pelayaran)/(Total % IK) x 100= %	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab lingkungan	8 dokumen	273.000.000	8 dokumen	270.226.250	100,00	98,98		Adanya Peralatan (opsi) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Peralatan pada Tahun berikutnya			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	8 dokumen	273.000.000	8 dokumen	270.226.250	100,00	98,98						
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayaran Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12 Dokumen	199.455.000	12 Dokumen	198.225.747	100,00	99,38		Adanya Peralatan (opsi) Yang Kurang Maksimal Atau Rusak Berat Sehingga Akan Mempengaruhi Terhadap Perhitungan/pengukuran Kualitas Udara	Untuk Dapat Dianggarkan Biaya Pemeliharaan / Penggantian Sarana Peralatan pada Tahun berikutnya			
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat/ lintas Kabupaten/ Kota yang	12 Laporan	199.455.000	12 Laporan	198.225.747	100,00	99,38						

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan					
						7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI												
					Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	14,29		14,29		100,00		Sangat Tinggi	Penetapan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Di Provinsi Banten belum dapat diproses dikarenakan luasannya kurang dari 10 Ha sehingga tidak belum dapat ditetapkan menjadi taman kehati provinsi	Menambah hiasan calon taman kehati provinsi (pengadaan lahan untuk kekeuangan hiasan Taman Kehati Provinsi ± 2 Ha )		Persentase Peningkatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati = (Σ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun + Σ jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan kehati + Σ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang di alokay) tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali 100%
				Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	100%	351.000.000	66,67%	300.569.655	66,67	85,63		Pontapan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Di Provinsi Banten belum dapat diproses dikarenakan luasannya kurang dari 10 Ha sehingga tidak belum dapat ditetapkan menjadi taman kehati provinsi	Menambah hiasan calon taman kehati provinsi (pengadaan lahan untuk kekeuangan hiasan Taman Kehati Provinsi (kekurangan ± 2 Ha )		
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1	174.367.000	1 Dokumen	167.030.060	100,00	95,79					
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100	143.248.000	100 Orang	127.029.595	100,00	88,68					
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	33.385.000	0 Unit	6.510.000	0,00	19,50					
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
					Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100		100		100,00		Sangat Tinggi	masih minimnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah domestik khususnya untuk masyarakat	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik khususnya untuk masyarakat.		Persentase Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 dokumen	268.419.200	3 dokumen	262.309.200	100,00	97,72		- Data jumlah timbulan Limbah B3 yang dihasilkan per kabupaten/ kota kurang akurat karena dari sekitar 2.900 industri yang ada di Provinsi Banten, hanya 1.000 industri yang telah terregistrasi dalam aplikasi SIMPEL dan dari 1.000 industri hanya 300 industri yang secara aktif melakukan penginputan data/ laporan ke dalam Aplikasi SIMPEL. - Minimnya sumber daya manusia sebagai pengendali atau pembina yang dapat melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap industri/ pelaku usaha.	- Untuk mendapatkan data jumlah timbulan Limbah B3 yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperluas koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan pembinaan/ pendampingan kepedaindustri/ pelaku usaha tentang cara penginputan data pengelolaan Limbah B3 ke dalam aplikasi SIMPEL. - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pada pelatihan/ workshop tentang pengelolaan Limbah B3 dengan memberdayakan SDM yang ada di DLHK Provinsi Banten.		
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	121.983.100	1 Dokumen	121.343.100	100,00	99,48					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2	146.436.100	2 Dokumen	140.966.100	100,00	96,26					
				PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
					Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	11,76		17,65		100,00		Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah		= Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutun Adas dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%
				Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	23.610.000	1 dokumen	20.225.075	100,00	85,66		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah		
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	23.610.000	1 dokumen	20.225.075	100,00	85,66					
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 Lembaga	180.939.000	4 Lembaga	174.898.360	100,00	96,66		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah		
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2	180.939.000	2 dokumen	174.898.360	100,00	96,66					

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
					Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100		141,67		141,67		Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah		Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dibagikan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	2.163.220.000	100%	2.066.773.558	100,00	92,77		kurangnya tenaga teknis maupun tenaga administrasi dalam melaksanakan kegiatan	Penambahan personel / tenaga teknis			
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	15 lembaga	345.300.000	15 lembaga	306.033.423	100,00	88,63						
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	108.500.000	2 Dokumen	85.488.410	100,00	78,79						
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	870	837.552.000	870 Orang	809.603.850	100,00	96,66						
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	269 keluarga	871.868.000	269 Keluarga	805.647.875	100,00	92,40						
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
					Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68 lembaga/ 7 Kab.kota		159 lembaga dan 7 kab. Kota adipura		233,82		Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah		= Jumlah sekolah adewiyata/ Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	68 lembaga/ 17 Kab.kota	635.000.000	159 lembaga dan 7 kab. Kota adipura	553.365.380	100,00	87,14		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	75 Entitas	635.000.000	75 Entitas	553.365.380	100,00	87,14						
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	80		84,00		105,00		Sangat Tinggi	Belum ditetapkannya Pengawas lingkungan /PPLH	Usulan Penetapan PPLH		Jumlah industri yang diawasi - jumlah industri yang dilindungi dan pengelolaan lingkungan hidup industri yang diawasi	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	621.186.000	100%	607.756.560	100,00	97,84		Belum ditetapkannya Pengawas lingkungan /PPLH	Usulan Penetapan PPLH			
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	16 Dokumen	286.045.000	16 Dokumen	283.054.710	100,00	98,95						
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	28 Orang	75.250.000	28 Orang	71.739.600	100,00	95,34						
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	125 Laporan	218.320.000	125 Laporan	213.086.800	100,00	97,60						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	41.571.000	1 Dokumen	39.875.450	100,00	95,92						
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
					Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100		100		100,00		Sangat Tinggi	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)	Mengusulkan Bimtek terkait PPLH dan PPNS LH		Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti - jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	327.438.000	100%	314.548.400	100,00	96,07		Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)	Mengusulkan Bimtek terkait PPLH dan PPNS LH		Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti - jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	20 dokumen	236.750.000	20 dokumen	227.186.400	100,00	95,96						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	4 dokumen	90.680.000	4 dokumen	87.362.000	100,00	96,34						

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan						
						7	8	9	10	11	12						
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																	
					Proporsitas penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	100		100,00		100,00		Sangat Tinggi	- Belum ditetapkannya TPST Regional Provinsi Banten - Masih minimnya pengawasan dan pemantauan sampah laut	- Mempercepat proses penetapan TPST Regional - Mendorong perlindungan mutu laut melalui pengawasan pemantauan sampah - Melakukan pemantauan sampah laut minimal 2 kali setahun		<i>2 rumus kerjasama tahun n</i> <i>2 Target Volume sampah ditangani Tahun n</i>	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	12.151.445.000	100%	11.856.622.850	100,00	97,57		Data jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per kabupaten/ kota kurang akurat; Penyerahan barantan Cator kepada Bank Sampah mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena keterlambatan pengiriman Cator dari pihak penyedia barang.	Untuk mendapatkan data jumlah timbulan sampah yang lebih akurat dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di kabupaten/ kota serta secara rutin melakukan kunjungan/ pendampingan cara penginputan data pengelolaan sampah ke dalam aplikasi SIPSN; Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan Cator kepada Bank Sampah, maka dengan memperkuat kesepakatan melalui poin-poin di dalam kontrak kerjasama dengan pihak penyedia barang.			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	74.885.000	1 Dokumen	68.810.000	100,00	91,89						
				Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional yang Ditetapkan	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional yang Ditetapkan	120 Ton	12.076.560.000	120 Ton	11.787.812.850	100,00	97,61						
B URUSAN PILIHAN																	
2 URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN																	
				DLHK													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN																	
					Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	25		32,61		130,44		Sangat Tinggi	- Permasalahan teoritis (penggunaan lahan atas sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan tersebut hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu: a. Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan komersial belum selesai b. Tidak Menutup Kawasan Hutan (TMKH) yang tidak tuntas di masa lalu c. Adanya tunggang tidak kawasan hutan dengan perkebunan sawah d. Masih adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Belum adanya sinergitas program dan kegiatan antar OPD baik di tingkat Provinsi Banten maupun OPD di tingkat Kabupaten/ Kota serta kerjasama yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota; - Kelembagaan petani dan kelembagaan usaha belum mampu mendorong petani untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang industri hiler	- Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Pinjam Pakai kawasan Hutan - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengelola kawasan hutan (Perum Perhutani) dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi pada kawasan hutan - Meningkatkan koordinasi dan melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan OPD lintas sektor baik antar OPD Provinsi Banten maupun Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. - Melakukan kegiatan-kegiatan teru usaha untuk membuka peluang-peluang pemaksimalan hasil produksi HHHBK;		<i>2 Perum/kawasan hutan</i> <i>2 Dasi Manajemen HHHK + 2 Dasi Manajemen HHHK</i> <i>2 target volume tahun</i>	
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	8 Dokumen	444.050.000	8 Dokumen	409.663.204	100,00	92,26		Belum tersosialisasinya peraturan perundang - undangan di bidang kehutanan terutama terkait peraturan terbaru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja secara menyeluruh	Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kebijakan perundang - undangan di bidang kehutanan baik bagi pengelola kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan masyarakat sekitar kawasan hutan			
				Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	8 Dokumen	444.050.000	8 Dokumen	409.663.204	100,00	92,26						
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	150.835.900	100,00	94,27		- Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk bertani dan berkebun sehingga memanfaatkan kawasan hutan dan adanya sertifikat ganda di dalam kawasan hutan	- Mengadakan sosialisasi peraturan terbaru terkait kebijakan perundang - undangan di bidang kehutanan baik bagi pengelola kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan masyarakat sekitar kawasan hutan			
				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	40.000.000	1 dokumen	36.469.050	100,00	91,17						
				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	40.000.000	1 dokumen	38.020.000	100,00	95,05						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	40.000.000	1 dokumen	38.966.850	100,00	97,47						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	40.000.000	1 dokumen	37.360.000	100,00	93,40						
				Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPH HHHK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	15 Unit manajemen	809.688.200	15 Unit manajemen	792.556.735	100,00	97,88		Masih lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan serta kurangnya informasi pasar serta masih kendala pemasaran dikarenakan hasil-hasil produksi bidang kehutanan masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk dipasarkan secara luas sehingga perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok;	Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas baik aparatur maupun kelompok-kelompok pembudidaya HHHBK agar semakin kuatnya sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok;			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Manajemen	88.846.800	1 Unit Manajemen	86.851.650	100,00	97,75						
				Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHHK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	14 Unit Manajemen	720.841.400	14 Unit Manajemen	705.705.085	100,00	97,90						

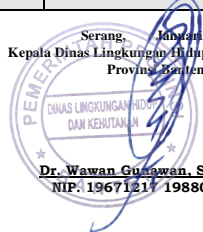
No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan					
						7	8	9	10	11	12					
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Dilayani	10 unit management	419.374.000	10 unit management	406.360.000	100,00	96,90		- Tidak semua industri IU-IPHHK yang menyampaikan laporan bulanan RPBB dan SIPHHK kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. - Belum ada kesepakatan dari industri kehutanan terkait perizinan berusaha di bidang kehutanan	- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin ke industri kehutanan yang ada di provinsi banten yang telah bertizn maupun tidak bertizn dengan bekerjasama dengan seksi lain dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Mendorong industri kehutanan yang belum memiliki tizn usaha untuk mendaftarkan memiliki tizn usaha di bidang kehutanan dengan mengadakan fasilitasi perizinan di bidang kehutanan		
				Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	5 Unit Managemen	226.000.000	5 Unit Management	218.310.000	100,00	96,60					
				Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit management	193.374.000	5 Unit management	188.050.000	100,00	97,25					
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2500		2.837,63			113,51	Sangat Tinggi	- masih luas nya lahan kritis - masih minimnya upaya penyebarluasan dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan	- Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.		
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (CDLHK-LT)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK-LT	1 Dokumen	70.200.000	1 Dokumen	64.017.939	100,00	91,19		tidak ada masalah	tidak ada masalah		
				Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	70.200.000	1 Dokumen	64.017.939	100,00	91,19					
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	100%	1.274.677.200	100%	979.619.242	100,00	76,85		- Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja - Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM). - Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.	- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparat, unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan. - Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone.		
				Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	325 Ha	820.851.700	325 Ha	742.501.000	100,00	90,45					
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	9 hektar	128.230.300	9 Ha	124.840.000	100,00	97,36					
				Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	20 Unit	255.950.200	20 Unit	53.823.942	100,00	21,03					
				Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	40 Laporan	42.120.000	40 Laporan	33.465.500	100,00	79,45					
				Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	2 Hektar	27.525.000	2 Hektar	24.988.800	100,00	90,79					
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2500		2.582,71			103,31	Sangat Tinggi	- masih luas nya lahan kritis - masih minimnya upaya penyebarluasan dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan	- Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.		Jumlah Lahan yang terehabilitasi = 2 peohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebunhan Bihit Hutan Rakyat Murni = 600 bag/Ha Jml Kebunhan Bihit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 bag/Ha Faas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit seratus = 600) bag/ba
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (CDLHK-PSC)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK-PSC	1 Dokumen	70.200.000	1 Dokumen	64.532.500	100,00	91,93		tidak ada masalah	tidak ada masalah		
				Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	70.200.000	1 Dokumen	64.532.500	100,00	91,93					
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100%	1.696.235.000	100%	1.648.274.147	100,00	97,17		- Luasnya Jangkauan Lokasi Kegiatan atau Wilayah Kerja - Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM). - Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas.	- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparat, unsur Penyuluh, PKSM dan Kelompok tani Hutan. - Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone.		
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	78.000.000	2 Dokumen	77.593.400	100,00	99,48					
				Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	478 Ha	958.000.000	478 Ha	930.675.425	100,00	97,15					
				Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Hektar	173.301.000	5 Hektar	168.201.925	100,00	97,06					
				Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	247 Unit	118.939.000	247 Unit	114.439.542	100,00	96,22					
				Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	31 Ha	219.375.000	31 Ha	215.449.225	100,00	98,21					
				Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	42.120.000	2 Laporan	39.791.500	100,00	94,47					
				Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	22 Hektar	106.500.000	22 Hektar	102.123.130	100,00	95,89					

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program		
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan							
						7	8	9	10	11	12							
					Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	90		90,38		100,42		Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi SDM yang tidak ter-up grade tentunya, padahal teknologi perbenihan terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan nilai ekonomis dari setiap jenis tanaman;</li> <li>Sarana dan prasarana yang rusak yang mengganggu proses produksi di laboratorium kultur jaringan sehingga banyak tanaman mati terkontaminasi penyakit karena rusaknya bangunan dan tidak berfungsinya pendingin ruangan;</li> <li>Kondisi pemukiman yang mengancam perubahan terencana pada long term program perbenihan, sistem penyiraman otomatis dan perlongoran dari bintang besar dan unggas yang masuk dalam pemukiman;</li> <li>Jumlah pegawai yang masih kurang terutama untuk kegiatan di pemenuhan pemenuhan dan laboratorium kultur jaringan yang berkompeten;</li> <li>Karangnya kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi bibit tanaman hutan dan produktif untuk masyarakat</li> </ul>	- Data minimal kebutuhan anggaran per kegiatan sesuai target kerja; - Memiliki lahan sendiri sehingga pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dapat dilaksanakan. - Peningkatan SDM yang berkompeten untuk pelaksanaan teknis kegiatan terutama yang berstatus PNS/PJK.		Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%		
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	182.401 Batang	853.600.000	184.695 batang	838.808.406	101,24	98,27		Sarana dan prasarana yang rusak yang mengganggu proses produksi di laboratorium kultur jaringan sehingga banyak tanaman mati terkontaminasi penyakit karena rusaknya bangunan dan tidak berfungsinya pendingin ruangan.	Mengajukan pengaduan lahan sehingga pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dapat dilaksanakan.				
				Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Hutan dan Produktif bersertifikat yang tersedia	182.401 Batang	853.600.000	184.695 batang	838.808.406	101,24	98,27							
				Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	100%	241.061.000	100%	236.875.254	100,00	98,26		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kemauan Pelaku usaha perbenihan tanaman hutan mendaftarkan perusahaannya karena lebih menguntungkan menjual bibit/bibit non sertifikat langsung kepada petani hutan;</li> <li>Sulitnya mendapatkan luasan garapan petani hutan yang dapat di jadikan calon sumber benih dengan syarat minimal seluas 1 (satu) Ha. Syarat penetapan sumber benih berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;</li> </ul>	Perlu adanya pemberian reward sebagai bentuk motivasi Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Hutan berupa pekerjaan pengaduan penunjukan langsung kepada Pengadaan Pengedaran Benih Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, serta rutin melakukan pembinaan kepada Ketembagaan Majelis Perbenihan dan Pembibitan Indonesia Kehutanan di Provinsi Banten;				
				Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan	1 Unit Usaha	55.775.000	1 Unit Usaha	55.027.300	100,00	98,66							
				Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	96.570.000	1 Sertifikat	94.905.700	100,00	98,28							
				Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1	28.088.000	1 Sertifikat	27.542.454	100,00	98,13							
				Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	10 Sertifikat	37.542.000	10 Sertifikat	36.305.500	100,00	96,71							
				Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	23.086.000	1 Laporan	23.074.300	100,00	99,95							
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA																		
					Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100		100,00		100,00		Sangat Tinggi	Perda pengelolaan Tahura Banten baru disahkan pada akhir tahun 2023 sehingga sosialisasi pengelolaan Tahura Banten belum optimal.	Perlu nya sosialisasi terkait Perda yang baru ditartapkan pada tahun anggaran berikutnya		# % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura/2		
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100%	1.221.090.000		1.177.403.190	100,00	96,42		tidak ada masalah	tidak ada masalah				
				Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah desa pelaksanaan penyuluhan tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	4 Desa	53.136.000	4 Desa	47.185.700	100,00	88,80							
				Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48 Operasi	436.690.000	48 Operasi	432.328.500	100,00	99,00							
				Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	60 Ha	115.000.000	60 Ha	112.570.963	100,00	97,89							
				Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Luas Areal Pengelolaan Koridor Hidupan Liar pada Jenis Satwa Liar di Habitatnya yang berada di Kawasan Tahura Provinsi	100 Ha	13.832.000	100 Ha	11.720.742	100,00	84,74							
				Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Ha	75.000.000	12,5 Ha	70.918.200	100,00	94,56							
				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjut	3 Permohonan	32.326.000	3 Permohonan	29.177.930	100,00	90,26							
				Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	26.060.000	1 Dokumen	25.107.000	100,00	96,34							
				Pengujian Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	75.000.000	4 Desa	72.998.790	100,00	97,33							
				Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui pembinaan daerah penyangga di sekitar Tahura Banten	5 Desa	91.528.600	5 Desa	87.686.560	100,00	95,80							
				Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	62.513.400	1 Dokumen	60.539.000	100,00	96,84							
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	3 Dokumen	240.004.000	3 Dokumen	227.169.805	100,00	94,65							
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	6 Kelompok		6 Kelompok		100,00		Sangat Tinggi	Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di wilayah Lebak dan Tangerang		Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Berhala - Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam masing-masing 3 kelompok per tahun		
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kawasan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Laporan	70.200.000	1 Laporan	68.324.100	100,00	97,33		Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di wilayah Lebak dan Tangerang				
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	70.200.000	1 Laporan	68.324.100	100,00	97,33							
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100%	140.400.000	100%	117.949.300	100,00	84,01		tidak ada masalah	tidak ada masalah				
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 Ha	35.100.000	1 Ha	28.918.600	100,00	82,39							

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan					
						7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	35.100.000	1 Ha	28.878.100	100,00	82,27					
				Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	70.200.000	40 Orang	60.152.600	100,00	85,69					
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon		6 Kelompok		6 Kelompok		100,00		Sangat Tinggi	Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di wilayah pandeglang serang dan cilegon		Jumlah Kelompok TSI dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok per tahun
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1 Laporan	55.594.000	1 Laporan	50.052.000	100,00	90,03		Kurangnya data terkait penangkar satwa liar sehingga berdampak pada pengawasan dan peredaran yang kurang terawasi	Perlu dilaksanakan kegiatan pendataan atau inventarisasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di wilayah pandeglang serang		
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	55.594.000	1 Laporan	50.052.000	100,00	90,03					
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	100%	167.606.500	100%	146.449.595	100,00	87,38		tidak ada masalah	tidak ada masalah		
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	5 Ha	35.100.000	5 Ha	32.470.695	100,00	92,51					
				Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	35.100.000	1 Ha	20.737.000	100,00	59,08					
				Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	97.406.500	40 Orang	93.241.900	100,00	95,72					
					Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	21,43		21,43		100,00		Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah		Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100%	874.571.000	100%	832.958.470	100,00	95,24		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah		
				Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	3 Dokumen	167.034.000	3 Dokumen	158.374.995	100,00	94,82					
				Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	3 Dokumen	223.514.000	3 Dokumen	213.472.940	100,00	95,51					
				Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	10 Ha	484.023.000	10 Ha	461.110.335	100,00	95,27					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN																
					Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	42 kelompok		43 kelompok		102,38		Sangat Tinggi	terbatasnya Bantuan alat untuk menunjang organisasi Kelompok Tani Hutan	Mengusulkan bantuan alat sarana prasarana organisasi kelompok tani hutan		Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan U1 Idara Pemberdayaan Masyarakat = Σ K111 + EMU + Σ Penyuluhan + Σ Kelompok Perhutanan Sosial
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100%	451.350.000	100%	421.099.990	100,00	93,30		terbatasnya Bantuan alat untuk menunjang organisasi Kelompok Tani Hutan	Mengusulkan bantuan alat sarana prasarana organisasi kelompok tani hutan		
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDW Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	160 orang	183.205.200	160 orang	169.415.570	100,00	92,47					

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Rumus DO Indikator Kinerja Program
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan					
						7	8	9	10	11	12					
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	40 Kelompok	140.400.000	40 Kelompok	136.129.200	100,00	96,96					
				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	127.744.800	500 Ha	115.555.220	100,00	90,46					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>																
					Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	20		100		500,00		Sangat Tinggi	tidak ada masalah	tidak ada masalah		Jumlah DAS yang ditangani Tahun N ..... ..... X 100% jumlah Keseluruhan DAS Prioritas
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	977.930.600		926.196.605	100,00	94,71		Tidak ada masalah	Tidak ada masalah		
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	94.267.040	100,00	94,27					
				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	280.889.200	1 Dokumen	257.639.050	100,00	91,72					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	220 Orang	491.482.000	220 Orang	473.096.930	100,00	96,26					
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan	1 Lembaga	32.924.400	1 Lembaga	32.677.460	100,00	99,25					
				Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	72.635.000	1 Laporan	68.516.125	100,00	94,33					
					<b>Rata rata capaian sub kegiatan</b>					99,47	94,52					

Serang, **Juli 2024**  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Provinsi Banten**



**Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19671217 198803 1 006**